

DARI KUOTA KE KEBIJAKAN: DILEMA REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

Arief Budiharjo¹, Arga Dawara², Gisella Putri³, Angela Saharita Putri⁴, Enda Yuni Aulia⁵, Eva Susanti⁶

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja, Sumatera Selatan, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6}

Corresponding Author: arief.budiharjo@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Received: 28 Mei 2026

Revised : 08 Juni 2026

Accepted: 19 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Keywords: gender politics, women's representation, local politics, regional policy, gender-responsive policy.

Kata Kunci: politik gender, representasi perempuan, politik lokal, kebijakan daerah, kebijakan responsif gender.

Abstract

Women's representation in politics is an important indicator in promoting inclusive and equitable governance. This study aims to analyze the dilemma of women's representation in local politics and its influence on the formulation of gender-responsive regional policies. The research employs a library research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected from guest lecture materials, books, scientific journals, legislation, and other relevant literature. The findings indicate that women's political representation should not only be measured by their numerical presence in political institutions but also by their ability to influence public policy-making processes. Local political dynamics involving regional governments, legislative bodies, political parties, and civil society organizations significantly affect the formulation of gender-responsive policies. However, patriarchal culture, limited access to political resources, and the suboptimal implementation of affirmative policies remain major obstacles to strengthening substantive women's representation. Therefore, strengthening women's political participation and fostering collaboration among local political actors are essential to producing more inclusive and equitable regional policies.

Abstrak

Representasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema representasi perempuan dalam politik lokal serta pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan daerah yang responsif gender. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari materi kuliah tamu, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa representasi perempuan tidak hanya diukur dari jumlah keterwakilan dalam lembaga politik, tetapi juga dari kemampuan memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik. Dinamika politik lokal yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, partai politik, dan organisasi masyarakat turut memengaruhi lahirnya kebijakan yang responsif gender. Namun, budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta belum optimalnya implementasi kebijakan afirmatif masih menjadi hambatan dalam memperkuat representasi substantif perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi politik perempuan dan sinergi antaraktor politik guna menghasilkan kebijakan daerah yang lebih

inklusif dan berkeadilan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik menjadi salah satu indikator penting dalam perkembangan demokrasi modern. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prinsip kesetaraan, tetapi juga berhubungan dengan upaya menghadirkan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, keterlibatan perempuan memiliki peran strategis karena kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah secara langsung memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, representasi perempuan dalam politik lokal menjadi isu yang terus mendapatkan perhatian dalam kajian politik dan pemerintahan.

Konsep gender pada dasarnya merujuk pada konstruksi sosial mengenai peran, tanggung jawab, serta posisi yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis, gender dibentuk melalui proses sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktik politik, konstruksi gender sering kali memengaruhi akses individu terhadap sumber daya politik, kesempatan kepemimpinan, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh ruang yang setara di bidang politik, terutama pada tingkat lokal yang dalam banyak kasus masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.

Berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik, termasuk ketentuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan legislatif. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Namun demikian, peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif belum selalu berbanding lurus dengan meningkatnya pengaruh perempuan terhadap substansi kebijakan publik yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara representasi yang bersifat deskriptif dan representasi yang bersifat substantif. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik menjadi lebih bermakna apabila mampu mendorong lahirnya kebijakan yang memperhatikan kepentingan kelompok rentan, memperkuat perlindungan hak-hak perempuan, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif.

Dalam proses pembentukan kebijakan daerah, dinamika politik lokal memiliki pengaruh yang

sangat besar. Kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor politik seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, media massa, serta kelompok kepentingan lainnya. Interaksi tersebut menciptakan ruang negosiasi, kompetisi, dan kolaborasi yang pada akhirnya menentukan arah kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai politik gender tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik lokal yang berkembang di suatu daerah.

Isu politik gender semakin relevan dalam konteks pembangunan daerah yang menekankan prinsip inklusivitas, partisipasi, dan keadilan sosial. Berbagai daerah di Indonesia telah menginisiasi kebijakan yang responsif gender sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak serta penguatan kesetaraan dalam pembangunan. Namun, tantangan berupa rendahnya keterwakilan perempuan, budaya patriarki, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya politik masih menjadi kendala dalam mewujudkan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema representasi perempuan dalam politik lokal serta mengkaji hubungan antara politik gender dan dinamika politik lokal dalam pembentukan kebijakan daerah yang responsif gender. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penguatan representasi perempuan dan kolaborasi antaraktor politik lokal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep, teori, serta berbagai temuan ilmiah yang berkaitan dengan politik gender, representasi perempuan, dinamika politik lokal, dan pembentukan kebijakan daerah yang responsif gender. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara keterwakilan perempuan dalam politik lokal dan proses pembentukan kebijakan publik di tingkat daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari materi kuliah tamu yang disampaikan oleh Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. mengenai politik gender dan dinamika politik lokal dalam pembentukan kebijakan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan kajian politik gender dan kebijakan

publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelaahan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk representasi perempuan dalam politik lokal, faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses politik, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan daerah yang responsif gender. Hasil analisis disajikan secara sistematis guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penguatan representasi perempuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Politik gender merupakan kajian yang membahas hubungan antara gender dan distribusi kekuasaan dalam proses politik, termasuk bagaimana laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, serta pengaruh dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, politik gender tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam lembaga politik, tetapi juga mencakup bagaimana perspektif gender diintegrasikan ke dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian, politik gender menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Pemahaman mengenai politik gender tidak dapat dilepaskan dari konsep gender itu sendiri. Gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang membentuk peran, tanggung jawab, serta ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis, gender terbentuk melalui proses sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Konstruksi tersebut kemudian memengaruhi pembagian peran sosial, akses terhadap sumber daya, serta peluang individu untuk terlibat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Dalam banyak kasus, konstruksi gender yang berkembang secara turun-temurun masih menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki dalam ruang politik.

Dalam sistem demokrasi modern, partisipasi politik yang setara merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Kehadiran perempuan dalam proses politik memberikan peluang yang lebih besar bagi terakomodasinya berbagai kepentingan

masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi prinsip kesetaraan, tetapi juga sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Kehadiran perspektif yang beragam dalam lembaga politik diyakini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas.

Dalam tata kelola pemerintahan daerah, perspektif gender memiliki posisi yang semakin penting seiring berkembangnya konsep pembangunan inklusif. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi ekonomi. Kebijakan yang responsif gender pada dasarnya merupakan kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam kebijakan daerah menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Materi kuliah tamu yang disampaikan oleh Dr. Tabah Maryanah menegaskan bahwa politik gender tidak hanya berfokus pada isu keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, tetapi juga mencakup bagaimana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan memengaruhi arah kebijakan publik. Politik gender mencakup berbagai aspek, seperti representasi perempuan, kepemimpinan perempuan, pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta upaya mengurangi berbagai bentuk ketimpangan yang masih terjadi dalam kehidupan politik. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan politik gender tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian, politik gender dalam tata kelola pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi perspektif gender dalam proses pemerintahan tidak hanya memperkuat kualitas demokrasi lokal, tetapi juga menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga negara.

Representasi Perempuan dalam Politik Lokal: Antara Kuantitas dan Substansi

Representasi politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan kepentingan dan aspirasinya melalui lembaga

politik. Dalam konteks politik gender, representasi perempuan tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif atau jabatan politik lainnya, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang mereka wakili. Oleh karena itu, pembahasan mengenai representasi perempuan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai kualitas keterwakilan yang dihasilkan dalam proses politik.

Kajian mengenai representasi politik umumnya membedakan dua bentuk representasi, yaitu representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif merujuk pada keterwakilan yang diukur berdasarkan jumlah atau proporsi perempuan yang menduduki posisi politik tertentu. Sementara itu, representasi substantif mengacu pada kemampuan perempuan dalam memengaruhi agenda politik, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang responsif terhadap isu-isu gender. Dengan kata lain, peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik belum tentu secara otomatis menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan apabila tidak diikuti dengan pengaruh yang nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya melalui ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif. Kebijakan afirmatif tersebut merupakan bentuk komitmen negara untuk memperluas akses perempuan dalam arena politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Melalui kebijakan ini diharapkan perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses politik dan turut menentukan arah pembangunan melalui lembaga perwakilan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan afirmatif masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, keterwakilan perempuan di berbagai daerah masih berada di bawah target yang diharapkan. Materi kuliah tamu yang disampaikan oleh Dr. Tabah Maryanah menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Selatan dan Lampung, masih belum mencapai tingkat yang mampu menciptakan pengaruh signifikan terhadap proses pembentukan kebijakan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menambah jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga oleh kemampuan sistem politik dalam menciptakan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan.

Rendahnya representasi substantif perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Budaya patriarki yang masih kuat dalam kehidupan sosial dan politik sering kali membatasi ruang gerak perempuan untuk tampil sebagai aktor politik utama. Selain itu, proses rekrutmen politik yang masih didominasi elit partai, keterbatasan sumber daya ekonomi, serta rendahnya akses terhadap jaringan

politik turut memengaruhi peluang perempuan untuk berkompetisi secara setara. Dalam beberapa kasus, perempuan yang berhasil memperoleh kursi politik juga masih menghadapi hambatan dalam memengaruhi agenda kebijakan karena dominasi kelompok politik tertentu dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik tetap memiliki arti penting bagi perkembangan demokrasi. Kehadiran perempuan memberikan peluang yang lebih besar bagi munculnya perspektif yang beragam dalam proses perumusan kebijakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam lembaga politik sering kali berkaitan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan keluarga, serta pelayanan publik yang lebih inklusif. Oleh karena itu, representasi deskriptif tetap menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan representasi substantif yang lebih kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama politik gender di tingkat lokal bukan hanya meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga politik, tetapi juga memastikan bahwa keterwakilan tersebut mampu diterjemahkan menjadi pengaruh yang nyata dalam proses pembentukan kebijakan daerah. Dengan demikian, keberhasilan representasi perempuan tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya kuota politik, melainkan dari sejauh mana perempuan dapat berperan sebagai aktor strategis dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dinamika Politik Lokal dalam Pembentukan Kebijakan Daerah

Pembentukan kebijakan daerah merupakan proses politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan tingkat pengaruh yang berbeda. Dalam sistem pemerintahan daerah, kebijakan tidak lahir secara otomatis dari kehendak satu lembaga tertentu, melainkan merupakan hasil interaksi, negosiasi, kompromi, serta kompetisi antaraktor politik yang terlibat dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, dinamika politik lokal memiliki peran yang sangat menentukan dalam membentuk arah dan substansi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan dua aktor utama dalam proses pembentukan kebijakan daerah. Pemerintah daerah berperan dalam merumuskan program pembangunan dan mengajukan berbagai rancangan kebijakan, sedangkan DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hubungan antara kedua lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat disahkan, direvisi, atau bahkan ditolak. Dalam praktiknya, proses pembentukan

kebijakan sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang di daerah, termasuk komposisi kekuatan partai politik di DPRD.

Partai politik memiliki posisi strategis dalam dinamika politik lokal karena menjadi saluran utama rekrutmen dan distribusi kekuasaan politik. Melalui partai politik, individu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik dan menduduki jabatan publik. Namun demikian, partai politik juga menjadi arena persaingan kepentingan yang dapat memengaruhi arah kebijakan daerah. Keputusan politik yang diambil sering kali tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan organisasi, koalisi politik, maupun strategi elektoral yang berkembang di tingkat lokal. Kondisi ini menjadikan proses pembentukan kebijakan sebagai arena yang kompleks dan penuh negosiasi.

Selain pemerintah daerah, DPRD, dan partai politik, organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memengaruhi proses kebijakan publik. Organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan menyampaikan aspirasi, melakukan advokasi, serta memberikan pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dalam isu politik gender, organisasi perempuan menjadi salah satu aktor yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Melalui berbagai kegiatan advokasi dan pendidikan politik, organisasi perempuan berupaya memastikan bahwa isu kesetaraan gender memperoleh perhatian dalam agenda kebijakan daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan media massa turut memberikan pengaruh terhadap dinamika politik lokal. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini publik terhadap berbagai isu politik dan kebijakan. Dalam banyak kasus, perhatian media terhadap isu tertentu dapat meningkatkan tekanan publik kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah kebijakan yang lebih responsif. Oleh karena itu, media menjadi salah satu aktor yang turut memengaruhi proses pembentukan kebijakan, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.

Materi kuliah tamu yang disampaikan oleh Dr. Tabah Maryanah menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan daerah yang responsif gender sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai aktor politik untuk membangun kolaborasi dan komitmen bersama. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik memang penting, tetapi efektivitas perjuangan politik gender juga ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai kelompok kepentingan lainnya. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan responsif gender merupakan hasil dari interaksi berbagai aktor yang memiliki kesadaran dan komitmen terhadap prinsip kesetaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dinamika politik lokal merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan kebijakan daerah. Kompleksitas hubungan antaraktor politik dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi upaya memperjuangkan kebijakan yang responsif gender. Ketika berbagai aktor mampu membangun sinergi dan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas, maka peluang lahirnya kebijakan yang inklusif akan semakin besar. Sebaliknya, apabila proses politik lebih didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu, maka tujuan untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender akan sulit tercapai.

Dilema Politik Gender dalam Pembentukan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, pembentukan kebijakan daerah yang responsif gender masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu dilema utama dalam politik gender adalah adanya kesenjangan antara peningkatan keterwakilan perempuan secara formal dengan kemampuan untuk memengaruhi substansi kebijakan publik. Dalam banyak kasus, keberhasilan memenuhi target keterwakilan perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kehadiran perempuan dalam lembaga politik terkadang lebih bersifat simbolik dibandingkan substantif.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan sosial dan politik. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam proses politik dan pemerintahan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, tetapi juga memengaruhi mekanisme rekrutmen politik, pembagian peran dalam partai politik, serta proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan. Akibatnya, perempuan sering kali harus menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan laki-laki untuk memperoleh posisi strategis dalam arena politik.

Selain faktor budaya, struktur politik yang berkembang di tingkat lokal juga menjadi tantangan tersendiri bagi penguatan politik gender. Proses pencalonan dan rekrutmen politik yang masih didominasi oleh elit partai sering kali membatasi kesempatan perempuan untuk berkembang secara optimal. Tidak sedikit perempuan yang berhasil memperoleh kursi politik karena memenuhi kebutuhan administratif pencalonan, namun belum memperoleh dukungan yang cukup untuk berperan secara efektif dalam proses legislasi maupun perumusan kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya bergantung pada jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga pada kemampuan sistem politik untuk menciptakan ruang partisipasi yang setara

dan inklusif.

Dilema lainnya muncul ketika perempuan yang telah berhasil menduduki jabatan politik harus berhadapan dengan berbagai kepentingan politik yang saling bersaing. Dalam proses pembentukan kebijakan daerah, keputusan yang diambil tidak selalu didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan partai politik, koalisi kekuasaan, maupun pertimbangan elektoral. Kondisi tersebut dapat membatasi ruang gerak perempuan untuk secara konsisten memperjuangkan agenda-agenda yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dengan demikian, tantangan politik gender tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari kompleksitas sistem politik itu sendiri.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, peluang untuk memperkuat politik gender dalam pembentukan kebijakan daerah tetap terbuka. Kebijakan afirmatif yang telah diterapkan selama ini memberikan dasar hukum yang penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Selain itu, semakin berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender turut mendorong munculnya dukungan yang lebih luas terhadap kepemimpinan perempuan. Peran organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta media massa juga semakin signifikan dalam mengawal isu-isu gender agar tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik menjadi salah satu strategi yang dapat memperkuat posisi perempuan dalam proses pembangunan daerah. Melalui pendekatan ini, perspektif gender tidak hanya dipahami sebagai kepentingan kelompok tertentu, tetapi ditempatkan sebagai bagian dari upaya menciptakan kebijakan yang lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang responsif gender tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga mendukung terciptanya pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dilema politik gender terletak pada jarak antara representasi formal dan pengaruh substantif dalam proses pembentukan kebijakan daerah. Keberhasilan memperjuangkan kebijakan yang responsif gender tidak cukup hanya melalui peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik, tetapi juga memerlukan perubahan budaya politik, penguatan kapasitas perempuan, reformasi mekanisme rekrutmen politik, serta komitmen berbagai aktor politik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dari Representasi ke Kebijakan: Implikasi Politik Gender terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Representasi perempuan dalam politik pada dasarnya tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga pemerintahan, tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keberadaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkaya sudut pandang yang digunakan dalam merumuskan kebijakan sehingga hasil kebijakan menjadi lebih komprehensif dan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok sosial. Oleh karena itu, politik gender memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kehadiran perempuan dalam lembaga politik memberikan peluang yang lebih besar bagi munculnya perhatian terhadap isu-isu yang selama ini kurang memperoleh prioritas dalam agenda pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki perhatian yang kuat terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Ketika perspektif tersebut terakomodasi dalam proses penyusunan kebijakan, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara sosial.

Politik gender juga berkontribusi terhadap penguatan prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Keterlibatan perempuan dalam proses politik membuka ruang yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semakin beragam kelompok yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan yang responsif gender memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang memperhatikan kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dapat membantu menciptakan akses yang lebih setara terhadap layanan publik dan manfaat pembangunan. Dengan demikian, politik gender tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perempuan semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Materi kuliah tamu yang disampaikan oleh Dr. Tabah Maryanah menunjukkan bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan responsif gender sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik akan memberikan dampak yang lebih signifikan apabila didukung oleh lingkungan politik yang terbuka terhadap nilai-nilai kesetaraan dan partisipasi. Oleh karena itu, penguatan politik gender memerlukan komitmen bersama dari seluruh aktor politik untuk menciptakan proses kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Bagi daerah seperti Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, penguatan representasi perempuan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan akan memperluas perspektif pembangunan serta membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan pembangunan, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara representasi perempuan dan kualitas kebijakan daerah bersifat saling berkaitan. Politik gender yang berjalan secara efektif akan memperkuat proses demokrasi lokal, meningkatkan kualitas kebijakan publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi dari representasi menuju kebijakan merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Politik gender memiliki peran yang penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prinsip kesetaraan, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam konteks politik lokal, representasi perempuan merupakan langkah awal yang penting untuk mendorong lahirnya kebijakan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara representasi perempuan secara kuantitatif dan representasi secara substantif. Meskipun kebijakan afirmatif telah memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, berbagai hambatan seperti budaya patriarki, dominasi elit politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta

kompleksitas dinamika politik lokal masih memengaruhi kemampuan perempuan dalam memberikan pengaruh nyata terhadap proses pembentukan kebijakan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik belum secara otomatis menghasilkan kebijakan yang responsif gender.

Oleh karena itu, penguatan politik gender memerlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan kapasitas politik perempuan, penguatan mekanisme rekrutmen yang inklusif, serta dukungan dari pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan terbangunnya sinergi antaraktor politik dan semakin kuatnya komitmen terhadap prinsip kesetaraan gender, representasi perempuan diharapkan tidak hanya berhenti pada pemenuhan kuota politik, tetapi mampu diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Marijan, Kacung. 2019. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pitkin, Hanna Fenichel. 1967. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.
- Sapiro, Virginia. 1981. Women, Biology, and Public Policy. Beverly Hills: Sage Publications.
- Sedarmayanti. 2018. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu dan Sumangunsong, Fernandes. 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Bandung: IPDN Press.
- Maryanah, Tabah. 2026. Politik Gender dan Dinamika Politik Lokal dalam Pembentukan Kebijakan Daerah. Materi Kuliah Tamu Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja, 4 Juni 2026.
- Berita Nusantara News. 2026. “Mempersiapkan Pemimpin Daerah Masa Depan, Prodi Ilmu Pemerintahan Unbara Hadirkan Guru Besar Universitas Lampung.” Berita Nusantara News, 5 Juni 2026.

Dari Kuota ke Kebijakan: Dilema Representasi Perempuan dalam Politik Lokal dan Pembentukan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender
Arief Budiharjo¹, Arga Dawara², Gisella Putri³, Angela Saharita Putri⁴, Enda Yuni Aulia⁵, Eva Susanti⁶

Berita Nusantara News. 2026. "Representasi, Kekuasaan, dan Kebijakan: Prodi Ilmu Pemerintahan Unbara Bahas Politik Gender dalam Legislasi Daerah." Berita Nusantara News, 5 Juni 2026.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.